



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
3. NHK : 187282

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.100.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 171.900.000

1. MOBIL, TOYOTA STARLET SEDAN Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA ACHIM21804 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.900.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 104.800.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.746.615

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.786.646.615

**III. HUTANG** Rp. 180.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.606.646.615

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.